

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI WILAYAH PROVINSI BALI

Oleh

Putu Ayu Octaviantari, NIM 1914101110

Program Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk (1) untuk mengkaji dan menganalisis penegakan serta perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia (*Human Trafficking*) di wilayah Provinsi Bali dan (2) untuk mengkaji dan menganalisis penegakan serta perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia (*Human Trafficking*) di wilayah Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penegakan hukum melibatkan Kepolisian Daerah Provinsi Bali, Dinas Ketenagakerjaan ESDM Provinsi Bali, dan Kantor Imigrasi Provinsi Bali. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum, termasuk dukungan, perlindungan hak-hak korban, rehabilitasi, dan pemulangan. Serta (2) kendala dalam penanganan kasus mencakup ketidaktahuan korban, ketakutan, dan kurangnya kesadaran sosial. Selain itu, pemerintah juga menghadapi kendala seperti model hak-hak prosedural yang menghalangi peran aktif korban dan kurangnya penerapan model pelayanan yang mendukung kepercayaan institusional. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap perekrutan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI), serta peningkatan kerjasama bilateral dengan negara tujuan.

Kata Kunci : Migran, Penegakan, Hambatan, Perdagangan Orang

**LEGAL PROTECTION FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS (PMI) IN
BALI PROVINCE**

By

Putu Ayu Octaviantari, NIM 1914101110

Law Study Program

ABSTRACT

This research was carried out with the aim of (1) to study and analyze legal enforcement and protection for victims of human trafficking in Indonesia (Human Trafficking) in the Bali Province region and (2) to study and analyze legal enforcement and protection for victims of human trafficking in Indonesia (Human Trafficking) in the Bali Province area. The research method used is empirical legal research with a descriptive approach, using primary and secondary data through document study, observation and interviews. The research results show that (1) law enforcement involves the Bali Provincial Police, the Bali Provincial Energy and Mineral Resources Employment Service, and the Bali Provincial Immigration Office. Regional governments are responsible for providing legal protection, including support, protection of victims' rights, rehabilitation and repatriation. And (2) obstacles in handling cases include the victim's ignorance, fear and lack of social awareness. Apart from that, the government also faces obstacles such as a procedural rights model that hinders the active role of victims and a lack of implementation of service models that support institutional trust. To overcome these obstacles, monitoring, supervision and evaluation of the recruitment of prospective Indonesian workers (CTKI) is needed, as well as increasing bilateral cooperation with destination countries.

Keywords: *Migrants, Enforcement, Barriers, Trafficking In Persons*